

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(STUDI KASUS: KECAMATAN TURI DAN KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN
SLEMAN)**

Oleh : Maryatun* dan Lasa Hs.*

Abstract

This study aims to describe the process and implementation of empowerment program that have been done by KIM to increase information access to improve the community welfare, identify the most influential program and obstacles faced in this implementation.

The objects of this study are Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) in Sleman; one case in Turi which represents the developed KIM, and the other case in Gamping which represents the developing KIM. The purpose of the empowerment of KIM is how the empowerment runs well through the development process to improve the importance of information awareness, increase information access and information empowerment through the group.

From the data analysis, the community empowerment process is done through several stages (1) awareness (2) capacity (3) support (4) performing the action and implementation; (5) evaluation. Meanwhile, the programs done by KIM cover 1) increasing information access media, 2) socialization, 3) participation in government activities, 4) Opening the network to the institutions / agencies / allied organisations 5) trainings, 6) participating in exhibition, 7) gaining the capital 8) Conducting assistance, 9) Following the comparative study, 10) Conducting formal meeting with the legislative commission, and, 11) media report. Those activities, indeed, can give awareness to the community that information can be useful to reduce uncertainty and can be used to make the best decision immediately. The community becomes more creative in running their business activities that can be able to increase their welfare.

The developed KIM has an easy access to information from various sources, has a capability to access information, discuss, and implements in a variety of business activities so that it can improve the community welfare, has cooperation network with related institutions, has a wider business activities, has more implementation programs, and has an ability to solve their own problems.

Keywords: Community empowerment, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), information access, community welfare.

* Pustakawan UGM

PENDAHULUAN

Pembubaran Departemen Penerangan pada tanggal 28 Oktober 1999 mengakibatkan terjadinya kekosongan infrastruktur komunikasi dan informasi di daerah. Rantai informasi pemerintah kepada masyarakat menjadi putus. Juru Penerang (Jupen) dan Kelompencapir sebagai institusi semi-masyarakat ikut dibubarkan, padahal masyarakat masih membutuhkannya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan belum mampu mengakses informasi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya infrastruktur yang memadai,

tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi serta budaya pada masyarakat.

Beberapa program penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tidak ada lagi yang merasa bertanggung jawab, sehingga semakin hari semakin sulit untuk memperoleh informasi yang terkait dengan peningkatan usaha serta kualitas hidup masyarakat. Masyarakat pedesaan memerlukan informasi perkembangan pasar untuk produk mereka, perkembangan teknologi pertanian dan perikanan, teknologi pengembangan produk dan masalah-masalah pengelolaan usaha kecil. Ketika permasalahan nasional muncul, seperti kenaikan harga BBM,

global warming, isu wabah flu burung, dampak krisis ekonomi global yang disinyalir berdampak pada krisis ekonomi pedesaan akibat dampak penurunan nilai rupiah dan peningkatan harga domestik (www.ugm.ac.id, 17-10-2008), mereka mengalami ketidakpastian informasi.

Untuk mengisi kekosongan infrastruktur tersebut, Direktorat Kelembagaan Sosial Departemen Komunikasi dan Informasi memandang perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyaluran informasi dan aspirasi masyarakat. Kemudian muncul Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan reaktualisasi dari Kelompencapir maupun dari hasil pembentukan kelompok baru sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat di bidang informasi yang berbasis dari inisiatif masyarakat.

Menurut data yang ada, di Kabupaten Sleman terdapat 17 Kelompok Informasi Masyarakat. Namun demikian hingga saat ini keberadaannya belum banyak dikenal oleh masyarakat. KIM yang sudah terbentuk juga belum banyak berperan dalam memediasi masyarakat dengan pihak-pihak lain, seperti perguruan tinggi, lembaga atau pusat-pusat penelitian, perpustakaan, lembaga donor, LSM serta lembaga-lembaga lain baik bersifat profit maupun nonprofit. Pola komunikasi melalui kelompok masyarakat belum dilakukan secara optimal. Seharusnya KIM yang salah satu fungsinya sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi, melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas seperti, pertanian, perdagangan, peternakan, industri dan mendapatkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengatasi persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat?
2. Apa saja variasi program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat terhadap peningkatan akses informasi untuk menambah kesejahteraan?

3. Apa perbedaan dan persamaan program tersebut pada kelompok yang lebih maju dibandingkan dengan kelompok yang belum maju?

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya", yang berarti kemampuan melakukan sesuatu (KBBI, 2005), sedangkan pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan.

Pengertian "proses" menurut Sulistiyani, (2004) menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis, sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Menurut Wrihatnolo, (2007) bahwa sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan:

- (1) Penyadaran, yaitu target yang akan diberdayakan diberikan penyadaran bahwa mereka dapat menjadi berdaya, dan itu dapat dilakukan apabila mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari ketidakberdayaannya;
- (2) Pengkapasitasan, yaitu pemberian kapasitas pada individu atau kelompok agar mampu menerima daya atau kekuasaan yang berupa pelatihan, seminar, dan sejenisnya;
- (3) Pemberian daya (*empowerment*), yaitu target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kecakapan yang telah dimiliki.

Hogan dalam Adi, 2008 menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan, yaitu:

- 1) menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan;
- 2) mendiskusikan alasan yang menyebabkan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan;
- 3) mengidentifikasi suatu masalah;
- 4) mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan;

5) mengembangkan rencana aksi dan mengimplementasikan.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Depkominfo (2006) bahwa pemberdayaan terjadi melalui proses peningkatan kesadaran pentingnya informasi, peningkatan akses, dan pendayagunaan informasi melalui kelompok. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dan hubungan yang bersifat sinergis antar segenap komponen (*stakeholder*) dengan fungsi dan peran masing-masing sebagai bagian dari sistem, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak terkait lainnya (Herman, 2007: 33).

Dharmawan mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai:

“a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living”

Menurut Sumodingrat (1999), pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat melalui: 1) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; 2) peningkatan kemampuan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai bantuan dan pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial; 3) perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Menurut laporan World Bank, 2005 bahwa ada empat elemen dasar dari pemberdayaan yaitu: (1) akses pada informasi; (2) partisipasi; (3) akuntabilitas; dan (4) kapasitas organisasi lokal. Jadi akses informasi merupakan salah satu komponen dari pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan memerlukan ketersediaan informasi dari agen pemberdaya.

Darwanto, 2004 menyebutkan bahwa unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya.

Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mendukung.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah sekumpulan individu yang berinteraksi dengan tujuan memecahkan masalah kehidupan dengan mengakses, mengolah dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari media massa dan berbagai sumber informasi serta mendesiminasikan kepada sesama anggota kelompok dan kepada masyarakat (Wahyudiyono, 2008).

Sesuai dengan kerangka acuan arah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, maka KIM mempunyai visi untuk mewujudkan KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera, sedangkan fungsi KIM sebagai wahana informasi, mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sarana peningkatan literasi masyarakat, dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Apabila dilihat dari kegiatan KIM, Ropingan, (2007) menemukan konsep-konsep interpretatif KIM sebagai berikut: (1) konsep demokrasi; (2) konsep dampak dan struktur organisasi; (3) konsep aspirasi masyarakat; dan (4) konsep arus informasi.

Berger dan Neuhaus (dalam Nugroho, 1997), secara konkret menunjuk lembaga-lembaga keluarga, ketetanggaan, keagamaan, dan lembaga keswadayaan merupakan institusi-institusi mediasi untuk membantu pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan KIM yang tumbuh dari bawah perlu didorong sebagai alternatif dalam rangka mengatasi kesenjangan informasi kepada masyarakat dan sebagai strategi dalam upaya kelancaran arus informasi di daerah pedesaan (Ropingan, 2007).

Akses Informasi

Indikator tingkat akses masyarakat terhadap informasi menurut Kartono (2004)

adalah tersedianya informasi yang transparan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi. Beberapa kebijakan pemerintah yang seharusnya diketahui oleh masyarakat hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang akan mereka peroleh, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dan sebagainya (Darwanto, 2004).

Akses informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, masyarakat dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan (Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, 2006).

Akses pada informasi dan teknologi penting untuk diperhatikan karena dapat meningkatkan efisiensi dan mampu berkompetisi dalam ekonomi global, memungkinkan untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan lain seperti, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan menciptakan sumber-sumber pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat miskin (World Bank, 2006).

Kesejahteraan Masyarakat

Ravallion & Loshin; Fuentes & Rojas; van Pragg, et.al (dalam Maika, 2006), menyebutkan bahwa pengukuran konsep kesejahteraan setidaknya memiliki dua bentuk pengukuran, yaitu objektif dan subjektif.

Nurcholis (2005) memberikan gambaran masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang kuantitatif memiliki pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri secara wajar dan secara kualitatif dapat menikmati kehidupan yang nyaman secara fisik dan spiritual.

Menurut Ropongan, (2007) dikatakan bahwa sebagai bukti bahwa peran KIM dapat meningkatkan kesejahteraan adalah diadakannya studi banding KIM kabupaten Ponorogo ke Malang. Studi banding tersebut mampu

memberikan inspirasi kelompok informasi masyarakat dalam menggali potensi di lingkungan sekitar untuk mendapatkan nilai tambah pemanfaatan fungsi kotoran ternak.

Proposisi

- 1) Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KIM meliputi tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, pemberian daya, mengembangkan rencana aksi, dan evaluasi.
- 2) Program pemberdayaan yang umumnya dilakukan oleh KIM mencakup: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, pembuatan paket informasi, mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintahan, membuka jaringan KIM ke institusi terkait dan mengadakan studi banding
- 3) Perbedaan dan persamaan program tersebut antara KIM yang lebih maju dan belum maju pada umumnya, yaitu:
KIM yang lebih maju sudah memiliki kemudahan akses informasi dari berbagai sumber, mampu mengakses informasi, mendiskusikan, dan mengimplementasikan dalam berbagai kegiatan usaha, terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda Sleman, memiliki jaringan kerjasama dengan institusi terkait dan mempunyai kegiatan usaha yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mengambil kasus Kelompok Informasi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. KIM di Kecamatan Turi untuk kasus yang mewakili KIM yang lebih maju dan KIM di Kecamatan Gamping yang mewakili kasus KIM yang belum maju. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dengan para informan, observasi, dokumentasi, catatan arsip dan perangkat fisik dari masing-masing KIM. Temuan kasus pertama dideskripsikan berdasarkan proposisi yang ada, kemudian dibawa untuk menguji pada temuan kasus kedua. Temuan kasus pertama dan kedua ditabulasi,

kemudian dibandingkan, di interpretasikan sehingga memperoleh deskripsi lintas kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KIM di Kabupaten Sleman

Di wilayah kabupaten Sleman telah terbentuk 17 Kelompok Informasi Masyarakat yang berada pada setiap kecamatan. KIM yang terbentuk diberi nama Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat yang merupakan forum binaan bagian Humas Kabupaten Sleman. Melalui forum tersebut diharapkan penyebaran informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat dari pada melalui jalur birokrasi. Oleh sebab itu Humas Kabupaten Sleman melakukan berbagai upaya yang diharapkan mampu mendorong pemberdayaan KIM.

Setiap KIM di wilayah Kabupaten Sleman memperoleh fasilitasi berupa anggaran sebesar Rp. 1.500,000,00 setiap tahun. Perkembangan KIM di setiap kecamatan dapat diketahui secara periodik melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang diadakan dua sampai tiga kali dalam setiap tahun.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyebarkan informasi selain melalui forum-forum komunikasi juga menerbitkan *Majalah Sembada, Tabloid Varia Slemantabloid Akar*.

Program pemberdayaan juga dilakukan dengan mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintahan, kegiatan ini ditegaskan dalam Surat Edaran ke Dinas atau instansi di lingkungan PEMDA yang berisi agar KIM dilibatkan dalam setiap ada acara sosialisasi sehingga informasi yang disampaikan cepat sampai ke masyarakat.

Berbagai produksi dari bidang usaha yang dimiliki KIM dibantu dalam promosi, yaitu melalui pameran potensi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun. Masing-masing kelompok diberi fasilitas tempat dan perlengkapan pameran secara gratis.

Upaya pemberdayaan KIM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tidak seluruhnya direspon dengan baik oleh kelompok. Alasannya anggaran yang masih

sedikit, pencairan anggaran yang berbelit-belit, dan masih adanya anggapan bahwa pemerintah daerah sebagai sumber dana.

KIM di Kecamatan Turi

KIM di Kecamatan Turi diberi nama Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat (KIKM) Kertomandiri yang anggotanya saling berinteraksi dengan mengakses informasi melalui berbagai media, mengolah, mendiskusikan, mengimplementasikan, dan menyebarluaskan informasi pada masyarakat.

Selain mempunyai fungsi sosial, KIKM Kertomandiri juga mempunyai fungsi profit, yaitu sebagai wadah anggotanya untuk bertukar informasi dalam kegiatan perekonomian, terutama kegiatan usaha yang dimiliki para anggotanya. KIKM menghubungkan anggota dengan pemerintah/swasta atau pihak lain dalam usaha untuk memperoleh penguatan modal, ketrampilan maupun pelatihan, peralatan untuk membantu proses produksi, serta untuk memperoleh peluang pasar bagi produk yang dihasilkan. Ide atau gagasan dibentuknya KIKM Kertomandiri berasal dari para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kecamatan Turi yang membutuhkan berbagai informasi berkaitan dengan bidang usahanya. Pada tanggal 12 Juni 2003 KIKM Kertomandiri dideklarasikan pembentukannya. Wilayah kerjanya meliputi Desa Donokerto, Desa Girikerto, Desa Bangunkerto, dan Desa Wonokerto.

Anggota KIKM saat ini berjumlah 42 orang, terdiri dari PNS, pensiunan, petani dan wiraswasta. Mereka tergabung dalam KIKM-UMKM Kertomandiri Kecamatan Turi yang menyelenggarakan pertemuan rutin setiap tanggal 20 pukul 14.00 wib. Bidang usaha yang digeluti anggota KIKM Kertomandiri antara lain: 1) bidang pertanian, meliputi budidaya salak pondoh, salak gading, salak organik, dan pembuatan pupuk kompos; 2) bidang peternakan, meliputi usaha ternak kambing PE, pemeliharaan puyuh dan ayam petelur, penggemukan sapi; 3) bidang perikanan, meliputi pembesaran lele, nila, gurami, dan mina salak; 4) bidang kerajinan,

meliputi pembuatan sangkar burung dan pemanfaatan biji salak; 5) bidang ekonomi, meliputi pembuatan aneka olahan salak seperti, dodol salak, wajik salak, suwar-suwir; 6) bidang usaha, meliputi penyulingan minyak nilam dan pembuatan briket arang; 7) bidang kesehatan, yaitu pembuatan minuman kesehatan dengan bahan jamu; 8) bidang pengairan, yaitu pengembangan Sistem Irigasi Pipa (SIP) Tirta Sembada di Dusun Jurugan Bangunkerto Turi; 9) bidang sosial, yaitu pembuatan MCK di Dusun Jurugan Bangunkerto Turi; 10) bidang budaya, yaitu pengembangan seni budaya karawitan dan melestarikan rumah budaya Jawa “Joglo Plawang”; 11) lain-lain, meliputi wirausaha cuci motor, warung sembako, pedagang salak, candak-kulak, warung makan, “eyek” (pedagang keliling).

KIM di Kecamatan Gamping

Tahun 2005 KIM di Kecamatan Gamping terbentuk atas himbauan dari Humas Pemda Kabupaten Sleman agar di setiap Kecamatan membentuk KIM untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar lebih cepat sampai ke masyarakat. Wilayah kerja KIM di Kecamatan Gamping meliputi Desa Trihanggo, Desa Nogotirto, Desa Banyuraden, Desa Ambarketawang, dan Desa Balecatur. Keanggotaan KIM di Kecamatan Turi melibatkan unsur tokoh masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Pegawai, PKK, dan Perwakilan Organisasi Nasiyatul ‘Aisyiah.

Temuan Kasus

Tabel 1. Proses Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh KIM

No.	Proses Pemberdayaan	KIM di Kec. Turi	KIM di Kec. Gamping
		KIM yang lebih maju	KIM yang belum maju
1	Penyadaran	Sosialisasi tentang pendayagunaan informasi	Sosialisasi tentang pendayagunaan informasi
2	Pengkapasitasan	Anggota dan masyarakat memperoleh pelatihan dari berbagai dinas/instansi terkait	Pelatihan dari Dinas Perindustrian tentang pembuatan kue kering dan kacang telur
3	Pemberian daya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan media akses informasi - Sosialisasi - Keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan - Membuka jaringan ke instansi/lembaga terkait - Pameran - Penguatan modal - Pendampingan - Studi banding - Audiensi - Liputan Media 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan media akses informasi - Sosialisasi - Keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan - Membuka jaringan ke instansi/lembaga terkait - Pameran - Penguatan modal - Pendampingan
4	Rencana aksi dan implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu kelompok/masyarakat dalam merumuskan dan menentukan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. - Membantu pembuatan proposal pada penyandang dana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu kelompok/masyarakat dalam merumuskan dan menentukan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. - Membantu pembuatan proposal pada penyandang dana.
5	Evaluasi	- Dilakukan setiap ada pertemuan rutin kelompok	- Dilakukan setiap ada pertemuan rutin kelompok WRSE dan kelompok warga kurang mampu.

Sumber: data diolah dari hasil wawancara

Mereka diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi di masyarakat. Pertemuan anggota direncanakan setiap tiga bulan sekali. Namun dengan alasan kesibukan masing-masing anggota pertemuan tidak dapat rutin diadakan tiga bulan sekali.

Dari tabel di atas terlihat bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan KIM di Kecamatan Turi dan KIM di Kecamatan Gamping mempunyai tahapan yang sama, yaitu tahap penyadaran bahwa masyarakat dapat memanfaatkan informasi untuk membantu mengatasi permasalahan sehingga mampu keluar dari ketidakberdayaannya. Tahap pengkapasitasan, yang berupa pelatihan sesuai dengan kebutuhannya, tahap pemberian daya sesuai dengan kecakapan yang telah dimiliki, tahap mengembangkan rencana aksi dan implementasi dan tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh para *stakeholder* dan antar warga masyarakat sendiri secara internal. KIM yang lebih maju mampu memberikan pengkapasitasan dan pemberian daya yang lebih bervariasi. Hal tersebut disebabkan :

1. Peran motor penggerak KIM di Kecamatan Turi merupakan sosok yang disegani oleh masyarakat dan mantan pejabat di lingkungan Depdiknas, sehingga mudah melakukan lobi-lobi kepada pejabat Pemda.
2. Anggota KIM di Kecamatan Turi merupakan individu-individu sebagai pelaku usaha yang membutuhkan informasi bagi produknya.
3. Beberapa anggota KIM di Kecamatan Turi merupakan pelaku usaha yang sudah tergolong pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah. Mereka dapat membantu anggota yang lain untuk membantu mempercepat proses pemberian daya, sedangkan KIM di Kecamatan Gamping mendampingi kelompok pelaku usaha yang semua anggotanya masih tergolong pada Kelompok Usaha Mikro. Mereka masih tergantung pada pemberi daya dari pihak di luar kelompoknya sehingga proses pemberdayaan memerlukan waktu yang relatif lebih lama.
4. Peran Camat dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai penasehat KIM di

Kecamatan Turi memiliki andil yang besar dalam proses pemberdayaan masyarakat.

5. Kecamatan Turi sebagai daerah wisata agro salak pondoh yang sudah terkenal dapat memberikan daya pada masyarakat bahwa mereka sebenarnya mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk keluar dari ketidakberdayaan.

Apabila melihat Tabel 1. tentang program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh KIKM Kertomandiri di Kecamatan Turi dan KIM di Kecamatan Gamping, maka kedua KIM tersebut mempunyai program yang sama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan studi banding di lokasi perkebunan strawberri di Ciwidey Bandung, audiensi dengan komisi B DPRD Kabupaten Sleman, dan liputan media merupakan kegiatan yang diadakan berkaitan dengan kemajuan yang diraih UMKM Kecamatan Turi. KIM berusaha untuk mengakses informasi, mengolah, menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk mendayagunakan informasi untuk kepentingan yang lebih bersifat ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada sedikit perbedaan program pemberdayaan yang telah dilakukan KIM. KIM yang lebih maju memiliki kemudahan akses informasi dari berbagai sumber, mampu mengakses informasi, mendiskusikan, mengimplementasikan dalam berbagai kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya, terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Sleman, banyak memiliki jaringan kerjasama dengan institusi terkait, mempunyai kegiatan usaha yang lebih luas, dan mempunyai program pemberdayaan yang lebih banyak. Hal tersebut disebabkan oleh awal waktu KIM mulai terbentuk, ide/gagasan pembentukan, dan yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang berperan sebagai motor penggerak KIM. Sebagai seorang motor penggerak harus mampu menjadi motivator yang dilandasi dengan rasa ikhlas, memiliki rasa peduli, dan menjadi fasilitator untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

Tabel 2. Program Pemberdayaan yang telah dilakukan KIM

NO.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	KIKM KERTOMANDIRI di KECAMATAN TURI (KIM lebih maju)	KIM di KECAMATAN GAMPING (KIM belum maju)
1	Peningkatan Media akses informasi	Pertemuan rutin, media cetak dan elektronik termasuk internet	Belum mengadakan pertemuan secara rutin, memanfaatkan media cetak dan elektronik
2	Sosialisasi	Kebijakan pemerintah, peluang usaha, pengembangan dan pemberdayaan KIM, Informasi yang harus segera diketahui masyarakat	Kebijakan pemerintah, peluang usaha, Informasi yang harus segera diketahui masyarakat
3	Keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan	Diundang dalam kegiatan sosialisasi oleh berbagai dinas/instansi (implementasi S.E. dari Humas Pemda)	Diundang dalam kegiatan sosialisasi oleh berbagai dinas/instansi (implementasi S.E. dari Humas Pemda)
4	Membuka jaringan ke instansi/dinas/lembaga terkait.	STIM YKPN, PT TELKOM, LIPPI, Dinas Perindustrian	Dinas sosial
5	Pelatihan	Mendapat berbagai pelatihan sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat dari instansi/dinas terkait	Pelatihan dari Dinas Perindustrian, pembuatan kacang telur dan kue kering
6	Pameran	Mengikuti pameran potensi daerah di Kabupaten, JEC dan dinas terkait dan Nasional	Mengikuti pameran potensi daerah di Kabupaten.
7	Penguatan modal	Pembentukan LKM, memperoleh pinjaman uang dari STIM YKPN	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
8	Pendampingan	Pada anggota	Pada kelompok warga kurang mampu dan WRSE
9	Studi banding	Perkebunan strawberry Ciwidey Bandung	Belum pernah
10	Melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kab. Sleman	Telah diadakan dua kali	Belum pernah
11	Liputan media	Koran, website, RRI dan TVRI	Belum pernah
12	Pembuatan paket informasi	Belum dilakukan	Belum dilakukan
13	Saran	Agar pemerintah lebih peduli pada KIM dengan menindaklanjuti program pemberdayaan yang telah dilakukan dan memberi kemudahan dan kesempatan yang lebih longgar untuk mengembangkan usaha para anggota dan masyarakat.	Kecamatan memperhatikan KIM, Pemda fasilitasi sarana dan prasarana, Pemerintah ikut mensosialisasikan keberadaan KIM.

Sumber: wawancara dengan pengurus dan anggota kelompok, data diolah

Kesimpulan dan Rekomendasi

- 1) Proses pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan Turi dan di Kecamatan Gamping melalui tahapan sebagai berikut: a) memberikan penyadaran tentang arti pentingnya informasi; b) pengkapasitasan; c) pemberian daya; d) membuat rencana aksi dan implementasi; e) melakukan evaluasi.
- 2) Program Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh KIM mencakup: (a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan; (b) pembuatan paket informasi; (c) mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintahan; (d) membuka jaringan KIM ke instansi terkait; (e) mengadakan studi banding; (f) peningkatan media akses informasi; (g) sosialisasi; (h) mengikuti kegiatan pameran; (i) penguatan modal; (j) pendampingan; (k) melakukan audiensi dengan Komisi DPRD; (l) liputan media.
- 3) Perbedaan program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh KIM yang lebih maju dan belum maju disebabkan oleh tahun awal terbentuknya KIM, Ide/gagasan pembentukan, dan peran motor penggerak.

Program pemberdayaan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kelompok masyarakat. Mereka dapat memperoleh informasi untuk mengakses ke sumber-sumber pembiayaan, peluang pasar, dan jaringan pemasaran yang berkaitan dengan bidang usahanya.

Hambatan yang dialami dalam aplikasi program pemberdayaan adalah sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi kemudahan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut Humas Pemda Sleman bersama KIM yang terbentuk di setiap kecamatan, melakukan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya informasi bagi masyarakat melalui proses pemberdayaan.

Rekomendasi

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan KIM untuk menambah temuan baru tentang program pemberdayaan dengan mengambil banyak kasus.
2. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat diperlukan:
 - a) peningkatan media akses informasi; b) pembuatan paket informasi; c) membuka akses ke sumber-sumber pembiayaan; d) peningkatan kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. Ed. (t.th). *Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan rakyat*. Yogyakarta: PAU-SE UGM dan BPFE.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Darwanto, Herry. (2004). *Pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasiskan masyarakat terpencil*. Majalah Perencanaan, September.
- Dharmawan, Arya Hadi. *Pendekatan-pendekatan pembangunan pedesaan dan pertanian: klasik dan kontemporer*. http://www.psp3ipb.or.id/uploaded/Teori_Teori_Pembangunan_Klasik_Kontemporer_2006.pdf. diakses 22 Oktober 2008.
- Djunaedi, Achmad. (2007). *Diseminasi informasi ke masyarakat*. Handout mata kuliah Manajemen Dukungan Layanan Informasi Program S2 Manajemen Informasi & Perpustakaan UGM.
- Huraerah, Abu dan Purwanto (2006). *Dinamika kelompok: konsep & aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Indonesia. Departemen Komunikasi dan Informatika. Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. (2006). *Kerangka acuan arah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)*. Jakarta: Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- International Telecommunication Union. (2004). *Multi purpose community Telecentre network project for African women*.

- <http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1101998920&lang=en>, 10 Maret 2009; 15.58 wib.
- Isbandiah HS (2004). *Jarkosmos: upaya pemberdayaan anggota masyarakat sebagai pelaku komunikasi*. Makalah disampaikan pada Forum Dialog Jarkomsos di Yogyakarta, 24 Agustus 2004.
- Ismawan, Bambang. (2003). *Partisipasi dan dimensi keswadayaan: pengalaman LSM membangun keswadayaan masyarakat*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Vol. 2 (3) Mei 2003: p. 1-7.
- Kartono, Derajat Tri. (2004). *Pembentukan sistem ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat kelurahan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Maika, Amelia. (2006). *Kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan: analisis data survei aspek kehidupan rumah tangga Indonesia 1997 – 2000*. Yogyakarta: Kerja sama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada dengan Partnership for Economic United States Agency for International Development.
- Nugroho, Heru. (1997). *Institusi-institusi mediasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat lapis bawah: studi kasus arisan di Bantul dan credit union di Timor-Timur*. Analisis CSIS, Vol. 26 (1) Januari-Februari 1997: p. 99-112.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Realyta, Silviana. (2007). *Hubungan komposisi kelompok dengan sikap etnosentrik*. http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journals&sf=author&keyword=silviana%20realyta&exact=1&task=search
- Ropingan. (2007). *Peran KIM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Lombok Barat*. KOMMTI: Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi, Vol. 1 (3) November 2007: 217-238.
- Rusadi, Udi. (2005). *Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam penyebaran dan pelancaran arus informasi*. Makalah disampaikan pada Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Yogyakarta, 1 September 2005.
- Satriya, Eddy. (2004). *WSIS dan pembangunan telematika nasional*. <http://www.scribd.com/doc/2386392/WSIS-DAN-PEMBANGUNAN-TELEMATIKA-NASIONAL?autodown=pdf>, diakses 10 Maret 2009; 16.50.
- Sulistiyani, Ambar Teguh (2004). *Kemitraan dan model pemberdayaan*. Yogyakarta: GavaMedia.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jarring pengaman sosial*. Jakarta: Gramedia.
- World Bank. (2005). *Measuring empowerment: cross, disciplinary perspectives*. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. (2006). *Global trends and policies*. Washington, D.C.: World Bank.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007). *Manajemen pemberdayaan: sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yin, Robert K. (1996). *Studi kasus (desain dan metode)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yogyakarta. Badan Pusat Statistik. (2005). *Kabupaten Sleman dalam angka 2004*. Yogyakarta: BPS Yogyakarta.
- Yogyakarta. Badan Pusat Statistik (2008). *Kabupaten Sleman dalam angka 2007*. Sleman: BPS.
- <http://goorganik.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=4&artid=13>, 25-10-2008; 14.00.
- <http://www.slemankab.go.id>, 25-11-2008; 13:15
- <http://www.ugm.ac.id>, 17-10-2008; 13.40